

## V. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Identitas Responden

Responden penelitian ini adalah masyarakat Kelurahan Labuhan Ratu Kecamatan Labuhan Ratu Kota Bandar Lampung yang berjumlah 98 orang. Selanjutnya untuk mengetahui secara lebih jelas tentang responden, dideskripsikan identitas responden menurut jenis kelamin, kelompok umur, pendidikan dan pekerjaan.

#### 1. Identitas Responden Menurut Jenis Kelamin

Identitas responden masyarakat Kelurahan Labuhan Ratu Kecamatan Labuhan Ratu Kota Bandar Lampung menurut jenis kelamin, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5. Identitas Responden Menurut Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase
1	Laki-Laki	66	67,35
2	Perempuan	32	32,65
<b>Jumlah</b>		98	100,00

Sumber: Pengolahan Data Penelitian Tahun 2014

Berdasarkan tabel di atas maka diketahui bahwa sebanyak 66 (67,355) responden berjenis kelamin laki-laki dan sebanyak 32 (32,65) responden berjenis kelamin perempuan. Dengan demikian maka sebagian besar responden dalam penelitian ini berjenis kelamin laki-laki.

## 2. Identitas Responden Menurut Kelompok Umur

Identitas responden masyarakat Kelurahan Labuhan Ratu Kecamatan Labuhan Ratu Kota Bandar Lampung menurut kelompok umur, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6. Identitas Responden Menurut Kelompok Umur

No	Kelompok Umur	Frekuensi	Persentase
1	47 tahun atau lebih	14	14.29
2	37-46 tahun	37	37.76
3	27-36 tahun	35	35.71
4	17-26 tahun	12	12.24
<b>Jumlah</b>		98	100,00

Sumber: Pengolahan Data Penelitian Tahun 2014

Berdasarkan data pada tabel di atas, diketahui bahwa dari 98 responden: sebanyak 14 (14,14%) responden berusia 47 tahun atau lebih, sebanyak 38 (38,38%) responden berusia antara 37-46 tahun, sebanyak 35 (35,35%) responden berusia antara 27-36 tahun dan sebanyak 12 (12,12%) responden berusia antara 17-26 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden berusia antara 37-46 tahun, yang bermakna bahwa pada umumnya responden berada pada kelompok usia yang masih produktif dalam melakukan pekerjaannya sehari-hari.

## 3. Identitas Responden Menurut Tingkat Pendidikan

Identitas responden masyarakat Kelurahan Labuhan Ratu Kecamatan Labuhan Ratu Kota Bandar Lampung menurut tingkat pendidikan, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 7. Identitas Responden Menurut Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Frekuensi	Persentase
1	Lulusan SD/ sederajat	6	6.12
2	Lulusan SMP/ sederajat	31	31.63
3	Lulusan SMA/ sederajat	45	45.92
4	Lulusan perguruan tinggi	16	16.33
<b>Jumlah</b>		98	100,00

Sumber: Pengolahan Data Penelitian Tahun 2014

Berdasarkan data pada tabel di atas, diketahui bahwa dari 98 responden: sebanyak 6 (6,12%) responden adalah lulusan SD/ sederajat, sebanyak 31 (31,63%) responden adalah lulusan SMP/ sederajat, sebanyak 45 (45,92%) responden adalah lulusan SMA/ sederajat dan sebanyak 16 (16,33%) responden adalah lulusan perguruan tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden telah menyelesaikan pendidikan sampai jenjang pendidikan menengah atas.

#### 4. Identitas Responden Menurut Pekerjaan

Untuk mengetahui identitas responden masyarakat Kelurahan Labuhan Ratu Kecamatan Labuhan Ratu Kota Bandar Lampung menurut pekerjaan, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 8. Identitas Responden Menurut Pekerjaan

No	Jawaban Responden	Frekuensi	Persentase
1	Pelajar/ Mahasiswa	12	12,24
2	Perusahaan Swasta	17	17,35
3	Pedagang	22	22,45
4	Wiraswasta	44	44,90
5	PNS	3	3,06
<b>Jumlah</b>		98	100,00

Sumber: Pengolahan Data Penelitian Tahun 2014

Berdasarkan data pada tabel di atas, diketahui bahwa dari 98 responden: sebanyak 12 (12,24%) responden adalah pelajar/wiraswasta, sebanyak 17 (17,35%) responden bekerja sebagai pada perusahaan swasta, sebanyak 22 (22,45%) responden bekerja sebagai pedagang, sebanyak 44 (44,90%) responden bekerja sebagai wiraswasta dan 3 (3,06%) responden bekerja sebagai PNS. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden bekerja sebagai wiraswasta atau mengusahakan lapangan pekerjaan sendiri.

## **B. Orientasi Politik Masyarakat Kota Bandar Lampung Terhadap Pencalonan Herman HN dalam Pemilihan Gubernur Lampung**

Orientasi politik merupakan suatu cara pandang masyarakat. khususnya di Kelurahan Labuhan Ratu Kecamatan Labuhan Ratu Kota Bandar Lampung terhadap objek berupa pencalonan Herman HN dalam Pemilihan Gubernur Lampung. Uraannya adalah sebagai berikut:

### **1. Orientasi Kognitif (Pengetahuan)**

Orientasi kognitif, berkaitan dengan pemahaman dan kesadaran masyarakat pada pencalonan Herman HN dalam Pemilihan Gubernur Lampung, yang meliputi pengetahuan masyarakat pada pencalonan Herman HN, sosialisasi pencalonan Herman HN, latar belakang Herman HN dan kemampuan kepemimpinan Herman HN dalam Pemilihan Gubernur Lampung.

#### **a. Pemahaman Responden pada Langkah Herman HN dalam Melakukan Sosialisasi Menjelang Pemilihan Gubernur**

Pemahaman responden pada terhadap langkah Herman HN dalam melakukan sosialisasi menjelang Pemilihan Gubernur, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 9. Pemahaman Responden pada Langkah Herman HN dalam Melakukan Sosialisasi Menjelang Pemilihan Gubernur

No	Jawaban Responden	Frekuensi	Persentase
1	Paham	70	71,43
2	Cukup Paham	22	22,45
3	Tidak Paham	6	6,12
<b>Jumlah</b>		98	100,00

Sumber: Pengolahan Data Penelitian Tahun 2014

Berdasarkan tabel di atas maka diketahui bahwa dari 98 responden: sebanyak 70 (71.43%) responden paham terhadap langkah Herman H.N melaksanakan sosialisasi menjelang Pemilihan Gubernur, sebanyak 22 (22.45%) responden menyatakan cukup paham terhadap langkah Herman H.N melaksanakan sosialisasi menjelang Pemilihan Gubernur dan sebanyak 6 (6.12%) responden menyatakan tidak paham pada langkah Herman H.N dalam melaksanakan sosialisasi menjelang Pemilihan Gubernur. Hal ini menunjukkan bahwa responden memahami langkah Herman H.N dalam melaksanakan sosialisasi menjelang Pemilihan Gubernur.

Menurut Almond dalam Arifin Rahman (1998: 33-34), salah satu komponen orientasi politik adalah komponen kognitif. Orientasi politik kognitif dapat diketahui dari pengetahuan seseorang atau masyarakat tentang kepercayaan pada politik peranan, dan segala kewajibannya serta *input*, dan outputnya dan juga untuk menilai tingkat pengetahuan seseorang mengenai jalannya sistem politik, tokoh-tokoh pemerintahan, kebijaksanaan yang mereka ambil, atau mengenai simbol-simbol yang dimiliki oleh suatu sistem politik.

Menurut Sjamsudin (1993: 7), orientasi politik merupakan cara pandang yang berhubungan erat dengan nilai-nilai yang dimiliki oleh masyarakat, orientasi

politik suatu masyarakat dapat muncul dari dalam masyarakat itu sendiri atau dapat muncul dari luar masyarakat. Akan tetapi tanggapan anggota masyarakat terhadap orientasi itu berbeda-beda tergantung dari pengetahuan dan nilai-nilai yang dimilikinya.

Sosialisasi yang dilaksanakan dengan tepatnya maksudnya adalah Calon Gubernur berkampanye sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, tidak melakukan kampanye hitam atau kampanye yang menyudutkan calon lain serta memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Calon Gubernur tidak diperkenankan melakukan kampanye hitam atau kampanye yang menyudutkan calon lain serta tidak memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Kampanye jenis ini hanya menjadikan masyarakat sebagai objek politik, yaitu memanfaatkan suara rakyat demi kepentingan pribadi calon Gubernur untuk memperoleh kekuasaan.

#### **b. Pemahaman Responden pada Materi Sosialisasi Menjelang Pemilihan Gubernur yang Dilaksanakan Herman HN**

Pemahaman responden pada materi sosialisasi oleh Herman HN menjelang Pemilihan Gubernur Lampung, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 10. Pemahaman Responden Pada Materi Sosialisasi oleh Herman HN Menjelang Pemilihan Gubernur Lampung

<b>No</b>	<b>Jawaban Responden</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Persentase</b>
1	Paham	49	50,00
2	Cukup Paham	38	38,78
3	Tidak Paham	11	11,22
<b>Jumlah</b>		98	100,00

Sumber: Pengolahan Data Penelitian Tahun 2014

Berdasarkan tabel di atas maka diketahui bahwa dari 98 responden: sebanyak 49 (50,00%) responden menyatakan paham terhadap sosialisasi oleh Herman HN menjelang Pemilihan Gubernur Lampung, sebanyak 38 (38,37%) responden menyatakan cukup paham terhadap sosialisasi oleh Herman HN menjelang Pemilihan Gubernur dan sebanyak 11 (11,22%) responden menyatakan tidak paham terhadap sosialisasi oleh Herman HN menjelang Pemilihan Gubernur. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden menyatakan paham terhadap sosialisasi oleh Herman HN menjelang Pemilihan Gubernur Lampung

Menurut Sjamsudin (1993: 8), orientasi seseorang bisa saja berubah sesuai dengan pengetahuan yang didapatnya dan nilai-nilai yang dimilikinya. Nilai-nilai itulah yang akan mempengaruhi, dan kadang-kadang dapat “membentuk”, keseluruhan “sikap” masyarakat terhadap suatu orientasi. Itulah yang muncul atau terpolakan keatas permukaan sebagai orientasi politik masyarakat Nilai-nilai itu dipengaruhi oleh faktor eksternal maupun internal. Faktor eksternal, yakni faktor yang berasal dari luar individu, yang dapat berupa informasi, pengetahuan, lingkungan, teman sepermainan dan sebagainya. Sedangkan faktor internal, yakni faktor yang berasal dari dalam diri individu, berupa pendidikan, keluarga dan sebagainya.

Sosialisasi oleh Herman HN menjelang Pemilihan Gubernur Lampung dapat menarik masyarakat karena adanya kecakapan calon dalam berpidato atau bersosialisasi, penguasaan materi sosialisasi dan ketanggapan dalam menjawab pertanyaan apabila ada audiens yang mengajukan pertanyaan. Sementara itu kemampuan calon dalam menyampaikan materi sosialisasi secara tidak baik ditandai dengan ketidakcakapan calon dalam berpidato atau bersosialisasi, tidak

ada penguasaan materi sosialisasi dan tidak tanggapnya calon dalam menjawab pertanyaan apabila ada audiens yang mengajukan pertanyaan. Adanya kemampuan dalam menguasai materi tersebut tentunya akan mendapatkan tanggapan yang baik dari masyarakat, sebab masyarakat bisa menilai salah satu calon yang dianggapnya dapat memimpin Provinsi Lampung. Pentingnya kemampuan dalam menguasai materi ini menunjukkan bahwa calon memiliki konsep kepemimpinan yang jelas dalam memimpin Provinsi Lampung.

### c. Pemahaman Masyarakat Terhadap Kegunaan Sosialisasi Herman HN Menjelang Pemilihan Gubernur

Pemahaman masyarakat terhadap kegunaan sosialisasi Herman HN menjelang Pemilihan Gubernur, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 11. Pemahaman Masyarakat Terhadap Kegunaan Sosialisasi Herman HN Menjelang Pemilihan Gubernur

No	Jawaban Responden	Frekuensi	Persentase
1	Paham	66	67,35
2	Cukup Paham	22	22,45
3	Tidak Paham	10	10,20
<b>Jumlah</b>		98	100,00

Sumber: Pengolahan Data Penelitian Tahun 2014

Berdasarkan tabel di atas maka diketahui bahwa dari 98 responden: sebanyak 66 (67,35%) responden menyatakan paham kegunaan sosialisasi Herman HN menjelang Pemilihan Gubernur, sebanyak 22 (22,45%) responden menyatakan cukup paham kegunaan sosialisasi Herman HN menjelang Pemilihan Gubernur dan sebanyak 10 (10,20%) tidak paham kegunaan sosialisasi Herman HN menjelang Pemilihan Gubernur. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden menyatakan paham kegunaan sosialisasi Herman HN menjelang Pemilihan Gubernur.



Menurut Goeltom dalam Mediastutie (2006: 15), orientasi politik merupakan suatu cara pandang masyarakat baik yang homogen maupun heterogen dalam struktur masyarakat tersebut, yang dilatar belakangi oleh nilai-nilai yang ada dalam masyarakat maupun yang berada diluar masyarakat. Sehingga dapat membentuk sikap dan menjadi terpola oleh mereka untuk memandang suatu objek politik

Dukungan masyarakat terhadap sosialisasi disebabkan oleh adanya kesesuaian pandangan masyarakat dengan strategi Herman HN yang sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat, seperti masalah pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup dan pengentasan kemiskinan. Sementara itu masyarakat yang menyatakan tidak baik disebabkan karena visi misi calon tidak sesuai dengan harapan atau kebutuhan mereka. Visi misi calon ini merupakan salah satu aspek yang akan dinilai oleh masyarakat, sebab dengan adanya visi misi yang jelas maka setidaknya calon akan mendapatkan penilaian yang baik dari masyarakat.

#### **d. Pemahaman Masyarakat Terhadap Reputasi Herman HN**

Pemahaman masyarakat terhadap reputasi Herman HN sebagai Calon Gubernur Lampung dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 12. Pemahaman Masyarakat Terhadap Reputasi Herman HN

<b>No</b>	<b>Jawaban Responden</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Persentase</b>
1	Paham	37	37,76
2	Cukup Paham	43	43,88
3	Tidak Paham	18	18,37
<b>Jumlah</b>		98	100,00

Sumber: Pengolahan Data Penelitian Tahun 2014

Berdasarkan tabel di atas maka diketahui bahwa dari 98 responden: sebanyak 37 (37,76%) responden menyatakan paham terhadap reputasi Herman HN sebagai Calon Gubernur Lampung, sebanyak 43 (43,88%) responden menyatakan cukup paham terhadap reputasi Herman HN sebagai Calon Gubernur Lampung dan sebanyak 18 (18,37%) responden menyatakan tidak paham terhadap reputasi Herman HN sebagai Calon Gubernur Lampung. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden paham terhadap reputasi Herman HN sebagai Calon Gubernur Lampung.

Menurut Nazarudin Sjamsuddin (1993: 10), orientasi politik masyarakat dapat berubah melalui dua cara yaitu dengan cara pemaksaan dan dengan cara persuasif. Jika orientasi politik masyarakat dilakukan dengan cara pemaksaan maka masalah yang akan timbul adalah sikap menentang dan perubahan sesaat. Suatu ciri yang menonjol yang melekat pada segala bentuk paksaan ialah bahwa tindakan itu tidak dikehendaki atau tidak disukai oleh yang menjadi sasaran pemaksaan. Reaksi yang lazim ditemui adalah sikap menentang. Penentangan terhadap suatu paksaan dapat saja mengambil bentuk yang keras ataupun lunak, tergantung kepada karakter daripada objek pemaksaan, disamping dipengaruhi oleh faktor-faktor lingkungan dan aksi keras yang diberikan terhadap upaya pemaksaan itu dapat berkembang menjadi faktor yang mengancam stabilitas sistem politik.

Reputasi yang baik akan terbangun pada masyarakat dengan cara menilai bahwa Calon Gubernur dianggap cukup mampu untuk melaksanakan berbagai program yang mereka janjikan pada saat kampanye. Sementara itu program yang tidak realistis maksudnya adalah masyarakat menilai bahwa Calon Gubernur dianggap

hanya mengumbar janji tetapi dinilai tidak mampu untuk melaksanakan berbagai program yang mereka janjikan pada saat kampanye. Masyarakat pada umumnya bisa memberikan penilaian secara tepat tentang program yang dianggap masuk akal atau tidak masuk akal serta dapat dilaksanakan atau tidak, hal ini berkaitan dengan pengalaman masyarakat terhadap kampanye politik pada pemilihan kepala daerah sebelumnya.

#### **e. Pemahaman Responden Terhadap Kedekatan Herman HN dengan Masyarakat**

Pemahaman responden terhadap kedekatan Herman HN dengan masyarakat, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 13. Pemahaman Responden Terhadap Kedekatan Herman HN dengan masyarakat

<b>No</b>	<b>Jawaban Responden</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Persentase</b>
1	Paham	59	60,20
2	Cukup Paham	27	27,55
3	Tidak Paham	12	12,24
<b>Jumlah</b>		98	100,00

Sumber: Pengolahan Data Penelitian Tahun 2014

Berdasarkan tabel di atas maka diketahui bahwa dari 98 responden: sebanyak 59 (60,20%) responden menyatakan paham bahwa Herman HN sebagai Calon Gubernur Lampung memiliki kedekatan dengan masyarakat, sebanyak 27 (27,55%) responden menyatakan cukup paham bahwa Herman HN sebagai Calon Gubernur Lampung memiliki kedekatan dengan masyarakat dan sebanyak 12 (12,24%) responden menyatakan tidak paham bahwa Herman HN sebagai Calon Gubernur memiliki kedekatan dengan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa

sebagian besar responden menyatakan paham bahwa Herman HN sebagai Calon Gubernur Lampung memiliki kedekatan dengan masyarakat.

Menurut Nazarudin Sjamsuddin (1993: 10), berapa lama perubahan yang dilaksanakan itu dapat bertahan dalam masyarakat. Jelas bahwa sesuatu yang dipaksakan itu merupakan hal yang tidak disukai sehingga masyarakat tidak akan mampu memelihara atau melestarikan orientasi yang dipaksakan itu, dan akan memberikan orientasi politiknya kepada penguasa pemerintah hal ini berarti bahwa orientasi politik akan hidup selama penguasa mampu menunjang kehadirannya kepada masyarakat

Kedekatan dengan masyarakat mengandung makna adanya kemampuan memahami kebutuhan masyarakat, yaitu calon dapat dengan cepat merespon berbagai kebutuhan dan harapan masyarakat di tempat ia berkampanye dan berusaha memberikan jalan keluar atas kebutuhan masyarakat tersebut. Sedangkan tidak mampu memahami kebutuhan masyarakat maksudnya adalah para calon tidak dapat dengan cepat merespon berbagai kebutuhan dan harapan masyarakat di tempat ia berkampanye dan tidak berusaha memberikan jalan keluar atas kebutuhan masyarakat tersebut. Kebutuhan masyarakat secara umum adalah kebutuhan yang bersifat dasar, yaitu kesejahteraan di bidang ekonomi, keterjangkauan biaya pendidikan, akses untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan pelayanan di bidang administrasi pemerintahan yang tidak berbelit-belit sehingga memudahkan masyarakat dalam mengurus berbagai surat atau administrasi kependudukan lainnya.

**f. Pemahaman Responden Terhadap Kemampuan Herman HN Membina Hubungan dengan Masyarakat**

Pemahaman responden terhadap kemampuan Herman HN membina hubungan dengan masyarakat, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 14. Pemahaman Responden Terhadap Kemampuan Herman HN Membina Hubungan dengan Masyarakat

No	Jawaban Responden	Frekuensi	Persentase
1	Paham	55	56,12
2	Cukup Paham	34	34,69
3	Tidak Paham	9	9,18
<b>Jumlah</b>		98	100,00

Sumber: Pengolahan Data Penelitian Tahun 2014

Berdasarkan tabel di atas maka diketahui bahwa dari 98 responden: sebanyak 55 (56,12%) responden menyatakan paham bahwa Herman HN sebagai calon Gubernur Lampung mampu membina hubungan dengan masyarakat, sebanyak 34 (34,69%) responden menyatakan cukup paham bahwa Herman HN sebagai calon Gubernur Lampung mampu membina hubungan dengan masyarakat dan sebanyak 9 (9,18%) responden menyatakan tidak paham bahwa Herman HN sebagai calon Gubernur Lampung mampu membina hubungan dengan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden menyatakan paham bahwa Herman HN sebagai calon Gubernur Lampung mampu membina hubungan dengan masyarakat.

Menurut Almond dalam Arifin Rahman (1998: 35), orientasi seseorang dapat dilihat secara sistematis jika memperhatikan pengetahuan apa yang dimiliki seorang tentang negara dan sistem politiknya dalam pengertian umum, sejarah,

ukuran lokasi, kekuasaan, sifat-sifat konstitusional dan lain-lain. Bagaimana perasaan-perasaannya terhadap karakteristik sistemik ini, dan bagaimana pendapatnya tentang kelebihan atau kekurangan serta penilainnya terhadap karakteristik yang sistemik tersebut. Bagaimana pemahaman seorang tentang struktur dan peranan, kaum elit politik dan pengajuan-pengajuan kebijaksanaan yang diperkenalkan di dalam arus pembuatan kebijaksanaan.

Kemampuan dalam berinteraksi yang dimaksud adalah adanya kecakapan Calon Gubernur untuk bersosialisasi dan menjalin hubungan yang baik dengan masyarakat setempat. Sementara itu tidak mampu berinteraksi yang dimaksud adalah adanya tidak adanya kecakapan Calon Gubernur untuk bersosialisasi dan menjalin hubungan yang baik dengan masyarakat setempat. Hubungan yang tercipta dengan baik tentunya akan menguntungkan calon yang bersangkutan, karena dengan adanya kedekatan maka menimbulkan simpati pada masyarakat.

#### **g. Pemahamn Responden Terhadap Kualitas Kepemimpinan Herman HN**

Pemahaman responden terhadap kualitas kepemimpinan Herman HN sebagai Calon Gubernur Lampung, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 15. Pemahaman Masyarakat Terhadap Kualitas Kepemimpinan Herman HN sebagai Calon Gubernur Lampung

<b>No</b>	<b>Jawaban Responden</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Persentase</b>
1	Paham	29	29,59
2	Cukup Paham	54	55,10
3	Tidak Paham	15	15,31
<b>Jumlah</b>		98	100,00

Sumber: Pengolahan Data Penelitian Tahun 2014

Berdasarkan tabel di atas maka diketahui bahwa dari 98 responden: sebanyak 29 (29,59%) responden menyatakan paham bahwa Herman HN memiliki kualitas kepemimpinan yang baik, sebanyak 54 (55,10%) responden menyatakan cukup paham bahwa Herman HN memiliki kualitas kepemimpinan yang baik dan sebanyak 15 (15,31%) responden menyatakan tidak paham bahwa Herman HN memiliki kualitas kepemimpinan yang baik.

Menurut Rusadi KantaPrawira (1998: 34), orientasi politik tersebut berhubungan dengan obyek politik, yaitu sistem politik secara keseluruhan, yakni meliputi antara lain: intensitas pengetahuan, ungkapan perasaan yang ditandai oleh apresiasi terhadap sejarah, ukuran lingkup lokasi, persoalan kekuasaan, karakteristik konstitusional negara atau sistem politiknya. Proses *input*, meliputi antara lain intensitas pengetahuan dan perbuatan tentang proses penyaluran segala tuntutan yang diajukan atau diorganisasi oleh masyarakat, termasuk prakara untuk menerjemahkan atau mengkonversi tuntutan-tuntutan tersebut sehingga menjadi kebijaksanaan yang otoritatif sifatnya dengan demikian proses *input* antara lain meliputi pula pengamatan atas partai politik, kelompok kepentingan, dan alat komunikasi massa yang nyata-nyata berpengaruh dalam kehidupan politik sebagai sarana penampung berbagai tuntutan.

#### **h. Pemahaman Responden pada Keberhasilan Kepemimpinan Herman HN**

Pemahaman responden terhadap keberhasilan kepemimpinan Herman HN adalah sebagai berikut:

Tabel 16. Pemahaman Responden pada Keberhasilan Kepemimpinan Herman HN

No	Jawaban Responden	Frekuensi	Persentase
1	Paham	37	37,76
2	Cukup Paham	47	47,96
3	Tidak Paham	14	14,29
<b>Jumlah</b>		98	100,00

Sumber: Pengolahan Data Penelitian Tahun 2014

Berdasarkan tabel di atas maka diketahui bahwa dari 98 responden: sebanyak 37 (37,76%) responden menyatakan paham bahwa Herman HN sebagai Calon Gubernur Lampung merupakan pemimpin yang berhasil, sebanyak 47 (47,96%) responden menyatakan cukup paham bahwa Herman HN sebagai Calon Gubernur Lampung merupakan pemimpin yang berhasil dan sebanyak 14 (14,29%) responden menyatakan tidak paham bahwa Herman HN sebagai Calon Gubernur Lampung merupakan pemimpin yang berhasil

Menurut Rusadi KantaPrawira (1998: 35), orientasi politik tersebut juga berhubungan dengan diri sendiri, meliputi antara lain: intensitas pengetahuan dan frekuensi perbuatan seseorang dalam mengambil peranan di arena sistem politik. Dipersoalkan apakah yang menjadi hak, kekuasaan dan kewajibannya. Apakah yang bersangkutan dapat memasuki lingkungan orang atau kelompok yang mempunyai pengaruh atau bahkan bagaimana caranya untuk meningkatkan pengaruhnya sendiri. Kemudian lebih lanjut dipersoalkan kriteria apakah yang dipakainya dalam membentuk pendapat dalam masyarakat atau sebagai keseluruhan sistem politik.



**i. Pemahaman Responden Terhadap Keberhasilan Pembangunan Kota Bandar Lampung oleh Herman HN**

Pemahaman responden terhadap keberhasilan pembangunan Kota Bandar Lampung oleh Herman HN, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 17. Pemahaman Rsponden Terhadap Keberhasilan Pembangunan Kota Bandar Lampung oleh Herman HN

No	Jawaban Responden	Frekuensi	Persentase
1	Paham	61	62,24
2	Cukup Paham	31	31,63
3	Tidak Paham	6	6,12
<b>Jumlah</b>		98	100,00

Sumber: Pengolahan Data Penelitian Tahun 2014

Berdasarkan tabel di atas maka diketahui bahwa dari 98 responden: sebanyak 61 (62,25%) responden menyatakan paham pada keberhasilan pembangunan Kota Bandar Lampung dalam kepemimpinan Herman HN, sebanyak 31 (31,62%) responden menyatakan cukup paham pada keberhasilan pembangunan Kota Bandar Lampung dalam kepemimpinan Herman HN dan 6 (6,12%) responden menyatakan tidak paham pada keberhasilan pembangunan Kota Bandar Lampung dalam kepemimpinan Herman HN. Menurut Nazarudin Sjamsudin (1993: 90), orientasi politik merupakan bagian dari budaya politik yang berkembang dimasyarakat. Budaya politik lazimnya sebagai seperangkat sikap, kepercayaan, dan perasaan warga negara terhadap sistem politik dan simbol-simbol (seperti bendera, bahasa dan lembaga-lembaga politik) yang dimilikinya.

**j. Pemahaman Responden Terhadap Keberhasilan Pelayanan Publik di Kota Bandar Lampung oleh Herman HN**

Pemahaman responden terhadap keberhasilan pelayanan publik di Kota Bandar Lampung oleh Herman HN, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 18. Pemahaman Responden Terhadap Keberhasilan Pelayanan Publik di Kota Bandar Lampung oleh Herman HN

No	Jawaban Responden	Frekuensi	Persentase
1	Paham	51	52,04
2	Cukup Paham	38	38,78
3	Tidak Paham l	9	9,18
<b>Jumlah</b>		98	100,00

Sumber: Pengolahan Data Penelitian Tahun 2014

Berdasarkan tabel di atas maka diketahui bahwa dari 98 responden: sebanyak 51 (52,04%) responden menyatakan paham pada peningkatan pelayanan publik di Kota Bandar Lampung dalam kepemimpinan Herman HN, sebanyak 38 (38,78%) responden menyatakan cukup paham pada peningkatan pelayanan publik di Kota Bandar Lampung dalam kepemimpinan Herman dan sebanyak 9 (9,18%) responden menyatakan tidak paham pada peningkatan pelayanan publik di Kota Bandar Lampung dalam kepemimpinan Herman HN.

Sementara itu menurut Affan Gaffar (1999: 100), masyarakat yang sikap dan orientasi politiknya didominasi oleh karakteristik yang bersifat kognitif akan terbentuk budaya politik yang parokial. Masyarakat yang sikap dan orientasi politiknya diwarnai oleh karakteristik yang bersifat afektif, akan terbentuk budaya politik yang bersifat subjektif. Masyarakat yang memiliki kompetensi politik yang tinggi, warganya mampu memberikan evaluasi terhadap proses politik yang berjalan, akan terbentuk budaya politik yang bersifat partisipatif

Berdasarkan uraian mengenai aspek kognitif, maka diketahui bahwa secara keseluruhan masyarakat di Kelurahan Labuhan Ratu memiliki aspek kognitif dalam orientasi politik terhadap pencalonan Herman HN sebagai Gubernur Lampung, yang masuk dalam kategori positif, dengan nilai rata-rata aspek

kognitif yaitu 2.6 (Lampiran 2). Secara terperinci, kategori aspek kognitif tersebut dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 19. Kategori Aspek Kognitif dalam Orientasi Politik Masyarakat Kota Bandar Lampung terhadap Pencalonan Herman HN dalam Pemilihan Gubernur Lampung

<b>Kategori</b>	<b>Skor</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Persentase</b>
Paham	3	71	72,45
Cukup Paham	2	27	27,55
Tidak Paham	1	0	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>98</b>	<b>100,00</b>

Sumber: Pengolahan Data Penelitian Tahun 2014

Berdasarkan tabel di atas maka diketahui bahwa dari 98 responden: sebanyak 71 (72,45%) responden memiliki orientasi politik dengan aspek kognitif terhadap Pencalonan Herman HN dalam Pemilihan Gubernur Lampung dalam kategori paham, sebanyak 27 (27,55%) responden memiliki orientasi politik dengan aspek kognitif terhadap Pencalonan Herman HN dalam Pemilihan Gubernur Lampung dalam kategori paham, dan tidak ada (0,00%) responden yang memiliki orientasi politik dengan aspek kognitif terhadap Pencalonan Herman HN dalam Pemilihan Gubernur Lampung dalam kategori tidak paham.

Hal ini menunjukkan bahwa aspek kognitif dalam orientasi politik masyarakat terhadap Pencalonan Herman HN dalam Pemilihan Gubernur Lampung masuk dalam kategori paham. Maknanya adalah masyarakat memiliki pemahaman yang baik terhadap langkah Herman H.N. dengan cara sosialisasi menjelang Pemilihan calon Gubernur, memahami materi sosialisasi yang dilakukan oleh Herman H.N. dengan baik, memahami kegunaan sosialisasi yang dilakukan oleh Herman H.N. sebagai upaya mendekatkan diri dengan masyarakat, memahami bahwa Herman

H.N. merupakan salah satu calon Gubernur yang memiliki reputasi baik. Masyarakat juga memahami bahwa Herman H.N. merupakan salah satu calon Gubernur yang dekat dengan masyarakat, mampu membangun hubungan yang baik dengan masyarakat yang dipimpinnya dan memahami bahwa selama memimpin Kota Bandar Lampung, Herman H.N. memiliki kualitas kepemimpinan yang baik. Masyarakat menilai bahwa Herman HN selama memimpin Kota Bandar Lampung dapat dinyatakan sebagai pemimpin yang berhasil, yaitu mampu melaksanakan pembangunan dengan baik dan berhasil memberikan pelayanan publik dengan baik.

## 2. Orientasi Afektif (Perasaan)

Orientasi afektif, berkaitan dengan perasaan dan sikap masyarakat pada pencalonan Herman HN dalam Pemilihan Gubernur Lampung, yang terdiri dari sikap masyarakat pada visi dan misi Herman HN serta sikap masyarakat pada pencalonan Herman HN dalam Pemilihan Gubernur Lampung

### a. Tanggapan Masyarakat Terhadap Visi Herman HN dalam memajukan Pendidikan

Tanggapan atau penilaian masyarakat terhadap visi Herman HN dalam memajukan pendidikan, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 20. Tanggapan atau penilaian masyarakat terhadap visi Herman HN dalam memajukan pendidikan

No	Jawaban Responden	Frekuensi	Persentase
1	Suka	44	44,90
2	Cukup Suka	42	42,86
3	Tidak Suka	12	12,24
<b>Jumlah</b>		98	100,00

Sumber: Pengolahan Data Penelitian Tahun 2014

Berdasarkan tabel di atas maka diketahui bahwa dari 98 responden: sebanyak 44 (44,90%) responden menyatakan suka terhadap visi Herman HN dalam memajukan pendidikan, sebanyak 42 (42,86%) responden menyatakan cukup suka terhadap visi Herman HN dalam memajukan pendidikan dan sebanyak 12 (12,24%) responden menyatakan tidak suka terhadap visi Herman HN dalam memajukan pendidikan.

Almond dan Verba dalam Arifin Rahman (1998: 43), mengartikan budaya politik sebagai suatu sikap orientasi yang khas dari warga negara terhadap sistem politik dan aneka ragam bagiannya, dan sikap terhadap peranan warga negara yang ada dalam sistem itu. Budaya Politik Parokial merupakan suatu budaya politik di mana tingkat partisipasi politik sangat rendah, yang disebabkan faktor kognitif (misalnya tingkat pendidikan rendah). Budaya politik parokial menyatakan, ketiadaanya harapan-harapan terhadap perubahan yang diperbandingkan dengan sistem politiknya, dengan demikian parokialisme dalam sistem bersifat yang diferensiatif, lebih bersifat efektif dan orientatif daripada kognitifnya. Budaya politik subyek merupakan suatu budaya politik di mana masyarakat sudah relatif maju baik sosial maupun ekonominya, tetapi masih relatif pasif.

Visi kampanye Calon Gubernur Lampung tentang pendidikan dinilai baik mengandung makna bahwa masyarakat menyadari pentingnya pendidikan dalam kehidupan guna mencapai cita-cita di masa yang akan datang dan merubah hidup menjadi lebih baik. Sementara itu materi kampanye Calon Gubernur Lampung tentang pendidikan dinilai tidak baik, mengandung makna bahwa masyarakat tidak menyadari pentingnya pendidikan dalam kehidupan guna mencapai cita-cita di masa yang akan datang dan merubah hidup menjadi lebih baik.

**b. Tanggapan Masyarakat Terhadap Visi Herman HN dalam memajukan Kesehatan**

Tanggapan atau penilaian masyarakat terhadap visi Herman HN dalam memajukan kesehatan, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 21. Tanggapan atau penilaian masyarakat terhadap visi Herman HN dalam memajukan kesehatan

No	Jawaban Responden	Frekuensi	Persentase
1	Suka	70	71,43
2	Cukup Suka	22	22,45
3	Tidak Suka	6	6,12
<b>Jumlah</b>		98	100,00

Sumber: Pengolahan Data Penelitian Tahun 2014

Berdasarkan tabel di atas maka diketahui bahwa dari 98 responden: sebanyak 70 (71,43%) responden menyatakan suka terhadap visi Herman HN dalam memajukan kesehatan, sebanyak 22 (22,45%) responden menyatakan cukup suka terhadap visi Herman HN dalam memajukan kesehatan dan sebanyak 6 (6,12%) responden menyatakan tidak suka terhadap visi Herman HN dalam memajukan kesehatan.

Almond dan Verba dalam Arifin Rahman (1998: 43), menyatakan bahwa suatu budaya politik yang ditandai dengan kesadaran politik yang sangat tinggi. Dalam budaya politik partisipan, orientasi politik secara eksplisit ditunjukkan kepada sistem secara keseluruhan, bahkan terdapat struktur, proses politik dan administratif.

Visi Calon Gubernur Lampung tentang kesehatan dinilai baik mengandung makna bahwa masyarakat menyadari bahwa kesehatan merupakan hal yang sangat

penting dalam kehidupan, dengan adanya kesehatan maka masyarakat dapat bekerja dan berusaha dengan maksimal, sehingga perlu upaya pemeliharaan kesehatan. Masyarakat telah bosan dengan janji-janji kesehatan gratis yang diucapkan para calon, sebab ketika mereka sakit mereka tetap saja mengalami kesulitan dalam mengakses dan menerima pelayanan kesehatan.

### c. **Tanggapan Masyarakat Terhadap Visi Herman HN dalam memajukan Pembangunan**

Tanggapan atau penilaian masyarakat terhadap visi Herman HN dalam memajukan pembangunan, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 22. Tanggapan atau penilaian masyarakat terhadap visi Herman HN dalam memajukan pembangunan

No	Jawaban Responden	Frekuensi	Persentase
1	Suka	38	38,78
2	Cukup Suka	43	43,88
3	Tidak Suka	17	17,35
<b>Jumlah</b>		98	100,00

Sumber: Pengolahan Data Penelitian Tahun 2014

Berdasarkan tabel di atas maka diketahui bahwa dari 98 responden: sebanyak 38 (38,78%) responden menyatakan suka terhadap visi Herman HN dalam memajukan pembangunan, sebanyak 43 (43,88%) responden menyatakan cukup suka terhadap visi Herman HN dalam memajukan pembangunan dan sebanyak 17 (17,35%) responden menyatakan tidak suka terhadap visi Herman HN dalam memajukan pembangunan. Hal ini menunjukkan sebagian besar responden menyatakan cukup suka pada visi Herman HN dalam memajukan pembangunan.

Muhammad A.S. Hikam (2002), menyebutkan bahwa fungsi legitimasi politik melalui Pemilu adalah legitimasi pemerintah atau penguasa dikukuhkan karena

pemerintah terpilih hakikatnya adalah pilihan rakyat terbanyak yang memiliki kedaulatan. Dalam hal ini, kebijaksanaan yang dibuat pemerintah selaku *decision maker* akan memperoleh dukungan atau sangsi yang kuat, karena keduanya berlandaskan sepenuhnya pada aspirasi rakyat dan bukan atas pemaksaan.

#### **d. Tanggapan Masyarakat Terhadap Visi Herman HN dalam memajukan Pelayanan Publik**

Tanggapan atau penilaian masyarakat terhadap visi Herman HN dalam memajukan pelayanan publik, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 23. Tanggapan atau penilaian masyarakat terhadap visi Herman HN dalam memajukan Pelayanan Publik

<b>No</b>	<b>Jawaban Responden</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Persentase</b>
1	Suka	54	55,10
2	Cukup Suka	33	33,67
3	Tidak Suka	11	11,22
<b>Jumlah</b>		98	100,00

Sumber: Pengolahan Data Penelitian Tahun 2014

Berdasarkan tabel di atas maka diketahui bahwa dari 98 responden: sebanyak 54 (55,10%) responden suka terhadap visi Herman HN untuk meningkatkan pelayanan publik, sebanyak 33 (33,67%) responden cukup suka terhadap visi Herman HN untuk meningkatkan pelayanan publik dan sebanyak 11 (11,22%) responden menyatakan tidak suka terhadap visi Herman HN untuk meningkatkan pelayanan publik. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden menyatakan suka visi Herman HN untuk meningkatkan pelayanan publik.



Muhammad A.S. Hikam (2002), menyebutkan bahwa fungsi sirkulasi elit politik dengan Pemilu adalah terjadinya sirkulasi atau pergantian elit kekuasaan dilakukan secara lebih adil, karena warga negaralah yang langsung menentukan siapa yang masih dianggap memenuhi syarat sebagai elit politik dan siapa yang tidak. Secara tidak langsung ini pula menggambarkan bahwa Pemilu memiliki fungsi kontrol warga negara terhadap pemerintahnya.

Visi Calon Gubernur Lampung dalam pelayanan public dan ekonomu dinilai baik mengandung makna bahwa masyarakat menyadari bahwa perekonomian perlu dikembangkan agar masyarakat bisa menikmati hasil dari pembangunan di bidang ekonomi. Sementara itu materi kampanye Calon Gubernur Lampung tentang ekonomi dinilai tidak baik, mengandung makna bahwa masyarakat merasa para pejabat pemerintahan tidak memperdulikan kondisi perekonomian masyarakat yang lemah dan hanya para pejabat dianggap hanya memikirkan diri sendiri beserta kelompoknya. Kondisi semacam ini dapat menimbulkan dampak hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan.

**e. Tanggapan Masyarakat Terhadap Visi Herman HN dalam memajukan Kesejahteraan Masyarakat**

Tanggapan atau penilaian masyarakat terhadap visi Herman HN dalam memajukan kesejahteraan masyarakat, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 24. Tanggapan atau penilaian masyarakat terhadap visi Herman HN dalam memajukan Kesejahteraan Masyarakat

No	Jawaban Responden	Frekuensi	Persentase
1	Suka	45	45,92
2	Cukup Suka	32	32,65
3	Tidak Suka	21	21,43
<b>Jumlah</b>		98	100,00

Sumber: Pengolahan Data Penelitian Tahun 2014

Berdasarkan tabel di atas maka diketahui bahwa dari 98 responden: sebanyak 45 (45,92%) responden menyatakan suka terhadap visi Herman HN untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sebanyak 32 (32,65%) responden menyatakan cukup suka terhadap visi Herman HN untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan sebanyak 21 (21,43%) responden menyatakan tidak suka terhadap visi Herman HN untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden menyatakan suka terhadap visi Herman HN untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Muhammad A.S. Hikam (2002), fungsi pendidikan politik Pemilu adalah sebagai alat untuk melakukan pendidikan politik bagi warga negara agar dapat memahami hak dan kewajiban politiknya. Dengan keterlibatan dalam proses pelaksanaan Pemilu, diharapkan warga negara akan mendapat pelajaran langsung tentang bagaimana selayaknya warga negara berkiprah dalam sistem demokrasi. Sehingga pada tataran selanjutnya akan mengakar pemahaman bahwa warga negara adalah pemegang kedaulatan tertinggi dan sangat menentukan gerak serta perjalanan bangsa dan negara.

Visi Calon Gubernur Lampung tentang kesejahteraan masyarakat dinilai baik mengandung makna bahwa masyarakat menghendaki adanya peningkatan kesejahteraan agar mereka bisa menikmati pembangunan di berbagai bidang. Sementara itu materi kampanye Calon Gubernur Lampung tentang kesejahteraan masyarakat dinilai tidak baik, mengandung makna bahwa masyarakat merasa selama ini tidak ada perubahan dalam bidang kesejahteraan masyarakat. Masyarakat kecil tetap saja berada dalam kesengsaraan, sedangkan para pejabat

pemerintahan kurang tanggap dalam memenuhi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan uraian mengenai aspek afektif, maka diketahui bahwa secara keseluruhan masyarakat di Kelurahan Labuhan Ratu memiliki aspek afektif dalam orientasi politik terhadap pencalonan Herman HN sebagai Gubernur Lampung, yang masuk dalam kategori positif, dengan nilai rata-rata aspek kognitif yaitu 2.6 (Lampiran 2). Secara terperinci, kategori aspek afektif tersebut dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 25. Kategori Aspek Afektif dalam Orientasi Politik Masyarakat Kota Bandar Lampung terhadap Pencalonan Herman HN dalam Pemilihan Gubernur Lampung

Kategori	Skor	Frekuensi	Persentase
Positif	3	54	55,10
Netral	2	44	44,90
Negatif	1	0	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>98</b>	<b>100,00</b>

Sumber: Pengolahan Data Penelitian Tahun 2014

Berdasarkan tabel di atas maka diketahui bahwa dari 98 responden: sebanyak 54 (55,10%) responden memiliki orientasi politik dengan aspek afektif yang positif terhadap Pencalonan Herman HN dalam Pemilihan Gubernur Lampung, sebanyak 44 (44,90%) responden memiliki orientasi politik dengan aspek afektif yang netral terhadap Pencalonan Herman HN dalam Pemilihan Gubernur Lampung, dan tidak ada (0,00%) responden memiliki orientasi politik dengan aspek afektif yang negatif terhadap Pencalonan Herman HN dalam Pemilihan Gubernur Lampung.

Hal ini menunjukkan bahwa aspek afektif dalam orientasi politik masyarakat terhadap Pencalonan Herman HN dalam Pemilihan Gubernur Lampung masuk dalam kategori positif. Maknanya adalah masyarakat menyukai visi dan misi Herman H.N. yang akan memajukan pendidikan di Lampung, meningkatkan bidang kesehatan, meningkatkan pembangunan, meningkatkan pelayanan publik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Lampung. Rasa suka masyarakat tersebut dapat berkaitan dengan pengalaman yang dirasakan oleh masyarakat pada saat menjadi walikota Bandar Lampung yang mendapatkan banyak kemudahan dalam bidang pendidikan, kesehatan dan pelayanan publik.

### **3. Orientasi Evaluatif (Perilaku/Tindakan)**

Orientasi evaluatif, berkaitan dengan penilaian dan tindakan yang dilakukan masyarakat pada pencalonan Herman HN dalam Pemilihan Gubernur Lampung terdiri dari penilaian masyarakat pada program dan kemampuan Herman HN dalam melaksanakan program jika terpilih menjadi Gubernur Lampung

#### **a. Dukungan Responden Terhadap Program Herman HN dalam Memajukan Pendidikan**

Dukungan responden terhadap Program Herman HN dalam Memajukan Pendidikan, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 26. Dukungan responden terhadap Program Herman HN dalam Memajukan Pendidikan

<b>No</b>	<b>Jawaban Responden</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Persentase</b>
1	Mendukung	38	38,78
2	Cukup Mendukung	47	47,96
3	Tidak Mendukung	13	13,27
<b>Jumlah</b>		98	100,00

Sumber: Pengolahan Data Penelitian Tahun 2014

Berdasarkan tabel di atas maka diketahui bahwa dari 98 responden: sebanyak 38 (38,78%) responden menyatakan mendukung program Herman HN untuk memajukan pendidikan, sebanyak 47 (47,96%) responden menyatakan cukup mendukung program Herman HN untuk memajukan pendidikan dan sebanyak 13 (13,27%) responden menyatakan tidak mendukung program Herman HN untuk memajukan pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden menyatakan mendukung program Herman HN untuk memajukan pendidikan di Provinsi Lampung.

Menurut Almond dalam Arifin Rahman (1998: 36), setiap masyarakat yang mengikuti perkembangan politik tentunya memiliki orientasi politik. Orientasi politik merupakan suatu sikap dan cara pandang dari golongan masyarakat terhadap fenomena-fenomena politik. Sikap dan cara pandang tersebut bisa dilatar belakangi oleh nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat, baik yang berasal dari dalam maupun dari luar masyarakat itu sendiri. Nilai-nilai yang berasal dari dalam seperti nilai-nilai budaya yang telah dimiliki oleh masyarakat dimana nilai-nilai tersebut telah tertanam. Sedangkan nilai-nilai yang berasal dari luar masyarakat seperti tingkat pendidikan, jenis pekerjaan pekerjaan, kondisi lingkungan dan sebagainya.

#### **b. Dukungan responden terhadap Program Herman HN dalam Memajukan Kesehatan**

Dukungan responden terhadap program Herman HN dalam memajukan kesehatan, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 27. Dukungan responden terhadap Program Herman HN dalam Memajukan Kesehatan

No	Jawaban Responden	Frekuensi	Persentase
1	Mendukung	55	56,12
2	Cukup Mendukung	29	29,59
3	Tidak Mendukung	14	14,29
<b>Jumlah</b>		98	100,00

Sumber: Pengolahan Data Penelitian Tahun 2014

Berdasarkan tabel di atas maka diketahui bahwa dari 98 responden: sebanyak 55 (56,12%) responden menyatakan mendukung program Herman HN dalam memajukan kesehatan, sebanyak 29 (29,59%) responden menyatakan cukup mendukung program Herman HN dalam memajukan kesehatan dan sebanyak 14 (14,29%) responden menyatakan tidak mendukung program Herman HN memajukan kesehatan . Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden menyatakan mendukung program Herman HN dalam memajukan kesehatan

Menurut Almond dalam Arifin Rahman (1998: 38), komponen evaluatif berbicara tentang penilaian terhadap sistem politik dan bagian-bagiannya. Orientasi evaluatif juga berkaitan dengan keputusan dan pendapat masyarakat terhadap partai politik pilihan, penyelesaian persoalan ekonomi, politik dan keamanan oleh pemimpin terpilih dan keterlibatan publik dalam kampanye.

### **c. Dukungan responden terhadap Program Herman HN dalam Memajukan Pembangunan**

Dukungan responden terhadap program Herman HN dalam memajukan pembangunan, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 28. Dukungan responden terhadap Program Herman HN dalam Memajukan Pembangunan

No	Jawaban Responden	Frekuensi	Persentase
1	Mendukung	47	47,96
2	Cukup Mendukung	43	43,88
3	Tidak Mendukung	8	8,16
<b>Jumlah</b>		98	100,00

Sumber: Pengolahan Data Penelitian Tahun 2014

Berdasarkan tabel di atas maka diketahui bahwa dari 98 responden: sebanyak 47 (47,96%) responden menyatakan mendukung program Herman HN dalam memajukan pembangunan, sebanyak 43 (43,88%) responden menyatakan cukup mendukung program Herman HN dalam memajukan pembangunan dan sebanyak 8 (8,16%) responden menyatakan tidak mendukung program Herman HN dalam memajukan pembangunan .

Menurut Sjamsudin (1993: 11), berbagai aktivitas politik praktis memiliki hubungan yang erat dengan orientasi, hal ini ditunjukkan oleh tingkah laku dan pola interaksi para politikus yang membentuk sistem dan struktur politik. Interaksi di antara struktur inilah yang selanjutnya memberikan dampak kepada orientasi politik masyarakat. Pembentukan komponen orientasi politik didasarkan pada keserasian atau ketidak serasian antara pelaksanaan politik praktis di lapangan dengan dengan nilai-nilai yang melandasi politik itu sendiri.

#### **d. Dukungan responden terhadap Program Herman HN dalam Memajukan Pelayanan Publik**

Dukungan responden terhadap program Herman HN dalam memajukan pelayanan publik, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 29. Dukungan responden terhadap Program Herman HN dalam Memajukan Pelayanan Publik

No	Jawaban Responden	Frekuensi	Persentase
1	Mendukung	53	54,08
2	Cukup Mendukung	35	35,71
3	Tidak Mendukung	10	10,20
<b>Jumlah</b>		98	100,00

Sumber: Pengolahan Data Penelitian Tahun 2014

Berdasarkan tabel di atas maka diketahui bahwa dari 98 responden: sebanyak 53 (54,08%) responden menyatakan mendukung program Herman HN dalam memajukan pelayanan publik, sebanyak 35 (35,71%) responden menyatakan cukup mendukung program Herman HN dalam memajukan pelayanan publik dan sebanyak 10 (10,20%) responden menyatakan tidak mendukung program Herman HN dalam memajukan pelayanan publik .

**e. Dukungan responden terhadap Program Herman HN dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat**

Dukungan responden terhadap program Herman HN dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 30. Dukungan responden terhadap Program Herman HN dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

No	Jawaban Responden	Frekuensi	Persentase
1	Mendukung	47	47,96
2	Cukup Mendukung	31	31,63
3	Tidak Mendukung	20	20,41
<b>Jumlah</b>		98	100,00

Sumber: Pengolahan Data Penelitian Tahun 2014



Berdasarkan tabel di atas maka diketahui bahwa dari 98 responden: sebanyak 47 (47,96%) responden menyatakan mendukung program Herman HN dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sebanyak 31 (31,63%) responden menyatakan cukup mendukung program Herman HN dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan sebanyak 20 (20,41%) responden menyatakan tidak mendukung program Herman HN dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden menyatakan mendukung program Herman HN dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Berdasarkan uraian mengenai aspek evaluatif, maka diketahui bahwa secara keseluruhan masyarakat di Kelurahan Labuhan Ratu memiliki aspek evaluatif dalam orientasi politik terhadap pencalonan Herman HN sebagai Gubernur Lampung, yang masuk dalam kategori positif, dengan nilai rata-rata aspek kognitif yaitu 2.7 (Lampiran 2) Secara terperinci, kategori aspek evaluatif tersebut dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 31. Kategori Aspek Evaluatif dalam Orientasi Politik Masyarakat Kota Bandar Lampung terhadap Pencalonan Herman HN dalam Pemilihan Gubernur Lampung

Kategori	Skor	Frekuensi	Persentase
Mendukung	3	69	70,41
Cukup Mendukung	2	29	29,59
Tidak Mendukung	1	0	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>98</b>	<b>100,00</b>

Sumber: Pengolahan Data Penelitian Tahun 2014

Berdasarkan tabel di atas maka diketahui bahwa dari 98 responden: sebanyak 69 (70,41%) responden memiliki orientasi politik dengan aspek evaluatif terhadap Pencalonan Herman HN dalam Pemilihan Gubernur Lampung dalam kategori

mendukung, sebanyak 29 (29,59%) responden memiliki orientasi politik dengan aspek evaluatif terhadap Pencalonan Herman HN dalam Pemilihan Gubernur Lampung dalam kategori cukup mendukung, dan tidak ada (0,00%) responden memiliki orientasi politik dengan aspek evaluatif terhadap Pencalonan Herman HN dalam Pemilihan Gubernur Lampung dalam kategori tidak mendukung.

Hal ini menunjukkan bahwa aspek evaluatif dalam orientasi politik masyarakat terhadap Pencalonan Herman HN dalam Pemilihan Gubernur Lampung masuk dalam kategori mendukung. Maknanya adalah masyarakat memberikan dukungan visi dan misi Herman H.N. yang akan memajukan pendidikan di Lampung, meningkatkan bidang kesehatan, meningkatkan pembangunan, meningkatkan pelayanan publik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Lampung. Dukungan masyarakat tersebut dapat berkaitan dengan pengalaman yang dirasakan oleh masyarakat pada saat menjadi walikota Bandar Lampung yang mendapatkan banyak kemudahan dalam bidang pendidikan, kesehatan dan pelayanan publik sehingga mereka mendukung Herman HN sebagai calon gubernur.

### **C. Kategori Orientasi Politik Masyarakat Kota Bandar Lampung Terhadap Pencalonan Herman HN dalam Pemilihan Gubernur Lampung**

Kategori orientasi politik masyarakat Kota Bandar Lampung terhadap Pencalonan Herman HN dalam Pemilihan Gubernur Lampung dalam penelitian dilakukan dengan analisis rumus interval untuk mengkategorisasikan jawaban responden pada kuesioner penelitian, ke dalam tiga kategori orientasi yaitu positif, netral dan negatif.

Kategorisasi tersebut didasarkan pada total jawaban pada dapat dilihat pada tabel jawaban responden (Lampiran 2), di mana nilai interval ditentukan dengan rumus:

$$I = \frac{NT - NR}{K}$$

Penentuan kategori orientasi politik masyarakat dilakukan dengan dasar banyaknya butir soal yang diajukan yaitu 20 soal dan teknik penentuan skor yang digunakan, sehingga diperoleh dasar perhitungan interval adalah sebagai berikut:

- a. Nilai Tertinggi (NT) adalah 3 (skor tertinggi) x 20 (banyaknya soal) = 60
- b. Nilai Terendah (NR) adalah 1 (skor terendah) x 20 (banyaknya soal) = 20
- c. Kategori (K) yang dicari adalah 3 (positif, netral dan negatif)

Perhitungan nilai intervalnya adalah sebagai berikut:

$$I = \frac{NT - NR}{K} \quad I = \frac{60 - 20}{3} = \frac{40}{3} = 13,33 = 13 \text{ (Pembulatan)}$$

Berdasarkan nilai interval sebesar 13 maka kategori orientasi politik masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Positif, apabila total jawaban responden berada pada interval 48 - 60
2. Netral, apabila total jawaban responden berada pada interval 34 - 47
3. Negatif, apabila total jawaban responden berada pada interval 20 - 33

Selanjutnya kategori orientasi politik masyarakat Kota Bandar Lampung terhadap Pencalonan Herman HN dalam Pemilihan Gubernur Lampung, disajikan pada tabel berikut:

Tabel 32. Kategori Orientasi Politik Masyarakat Kota Bandar Lampung terhadap Pencalonan Herman HN dalam Pemilihan Gubernur Lampung

<b>Kategori Orientasi</b>	<b>Rentang Interval</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Persentase</b>
Positif	48 – 60	53	54,08
Netral	34 – 47	45	45,92
Negatif	20 – 33	0	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>98</b>	<b>100,00</b>

Sumber: Pengolahan Data Penelitian Tahun 2014

Berdasarkan tabel di atas maka diketahui bahwa dari 98 responden: sebanyak 53 (54,08%) responden memiliki orientasi politik yang positif terhadap Pencalonan Herman HN dalam Pemilihan Gubernur Lampung, sebanyak 45 (45,92%) responden memiliki orientasi politik yang netral terhadap Pencalonan Herman HN dalam Pemilihan Gubernur Lampung dan tidak ada (0,00%) responden memiliki orientasi politik yang negatif terhadap Pencalonan Herman HN dalam Pemilihan Gubernur Lampung. Hal ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan dapat dinyatakan bahwa orientasi politik masyarakat Kelurahan Labuhan Ratu Kecamatan Labuhan Ratu terhadap Pencalonan Herman HN dalam Pemilihan Gubernur Lampung termasuk dalam kategori orientasi politik yang positif.

#### **D. Pembahasan**

Berdasarkan hasil penelitian maka diketahui bahwa sebagian besar masyarakat Kelurahan Labuhan Ratu Kecamatan Labuhan Ratu memiliki orientasi politik yang positif terhadap Pencalonan Herman HN dalam Pemilihan Gubernur Lampung. Orientasi pada dasarnya merupakan suatu proses pengamatan terhadap sesuatu objek yang didalamnya menyangkut tanggapan kebenaran langsung,

keyakinan terhadap objek tersebut yang pada akhirnya akan berpengaruh terhadap kecenderungan seseorang untuk bertindak senang atau tidak senang yang merupakan jawaban atas pertanyaan apa yang diorientasikan tentang suatu objek tersebut. Secara umum dan keseluruhan, orientasi dapat diartikan sebagai kesan-kesan, penafsiran seseorang terhadap objek tertentu yang didapat melalui panca inderanya.

Orientasi politik dalam kaitannya dengan penelitian ini merupakan cara pandang yang berhubungan erat dengan nilai-nilai yang dimiliki oleh masyarakat, orientasi politik suatu masyarakat dapat muncul dari dalam masyarakat itu sendiri atau dapat muncul dari luar masyarakat. Akan tetapi tanggapan anggota masyarakat terhadap orientasi itu berbeda-beda tergantung dari pengetahuan dan nilai-nilai yang dimilikinya. Orientasi politik seseorang bisa saja berubah sesuai dengan pengetahuan yang didapatnya dan nilai-nilai yang dimilikinya. Nilai-nilai itulah yang akan mempengaruhi, dan kadang-kadang dapat “membentuk”, keseluruhan “sikap” masyarakat terhadap orientasi. Itulah yang muncul atau terpolakan ke atas permukaan sebagai orientasi politik masyarakat.

Orientasi politik yang dimaksud merupakan suatu cara pandang masyarakat terhadap objek berupa pencalonan Herman HN dalam Pemilihan Gubernur Lampung, adalah sebagai berikut:

1. Orientasi kognitif, berkaitan dengan pemahaman masyarakat pada pencalonan Herman HN dalam Pemilihan Gubernur Lampung, pemahaman masyarakat pada sosialisasi dalam pencalonan Herman HN dalam Pemilihan Gubernur Lampung, Pemahaman masyarakat pada latar belakang Herman HN dalam

Pemilihan Gubernur Lampung dan masyarakat memahami kemampuan kepemimpinan Herman HN dalam Pemilihan Gubernur Lampung

2. Orientasi afektif, berkaitan dengan perasaan dan sikap masyarakat pada pencalonan Herman HN dalam Pemilihan Gubernur Lampung, yaitu sikap masyarakat pada visi misi dan pencalonan Herman HN dalam Pemilihan Gubernur Lampung
3. Orientasi evaluatif, berkaitan dengan penilaian dan tindakan yang dilakukan masyarakat pada pencalonan Herman HN dalam Pemilihan Gubernur Lampung, yaitu penilaian masyarakat pada program Herman HN dalam Pemilihan Gubernur Lampung dan penilaian masyarakat pada kemampuan Herman HN dalam melaksanakan program jika terpilih menjadi Gubernur Lampung.

Perbedaan kategori orientasi politik masyarakat Kelurahan Labuhan Ratu Kecamatan Labuhan Ratu terhadap Pencalonan Herman HN dalam Pemilihan Gubernur Lampung tersebut dapat dipengaruhi oleh faktor pendidikan, yaitu masyarakat yang berpendidikan rendah memiliki kecenderungan orientasi politik yang netral sedangkan masyarakat yang berpendidikan tinggi memiliki kecenderungan orientasi politik yang positif. Faktor lain yang dapat mempengaruhi adalah pengalaman, di mana masyarakat yang memiliki pengalaman yang buruk terhadap kampanye sebelumnya (misalnya calon Gubernur hanya mengumbar janji tetapi tidak merealisasikan setelah terpilih) akan memiliki kecenderungan orientasi yang negatif atau netral.

Selain adanya perbedaan dalam orientasi masyarakat namun terdapat kesamaan di antaranya adalah masyarakat menginginkan kampanye yang memberikan pembelajaran atau pendidikan politik kepada masyarakat. Kegiatan kampanye politik seharusnya merupakan sarana bagi para calon Gubernur dan wakilnya untuk menyampaikan informasi dan pengetahuan tentang politik yang berkaitan dengan Pemilihan Kepala Daerah.

Pilkada dalam hal ini menjalankan perannya dalam konteks penguatan demokrasi kerakyatan sebagai bentuk dukungan atas pelebagaan demokrasi di tingkat lokal. Pilkada langsung dianggap lebih demokratis, dengan dua pertimbangan. *Pertama*, Pilkada langsung memberi kesempatan yang lebih luas untuk tampilnya/terpilihnya kepala daerah yang sesuai dengan kehendak mayoritas rakyat. *Kedua*, dengan Pilkada langsung maka stabilitas pemerintahan lebih terjaga berhubung kepala daerah tidak mudah dijatuhkan oleh DPRD.

Pilkada langsung mengandung empat asumsi normatif. *Pertama*, terjadinya penarikan kedaulatan rakyat yang sebelumnya dititipkan kepada DPRD. Jika sebelumnya para anggota DPRD memiliki fungsi memilih kepala daerah, kini fungsi tersebut dihapus. *Kedua*, sumber kekuasaan adalah rakyat. Penilai terakhir dari segala tingkah laku, program kerja, dan kinerja kepala daerah adalah rakyat. *Ketiga*, rakyat adalah subyek demokrasi. Maksudnya, rakyat dapat memainkan peran dan posisi sebagai pelaku demokrasi melalui saluran yang tersedia, baik dalam proses pembuatan kebijakan publik atau rekrutmen pemimpin politik. *Keempat*, demokrasi merupakan sistem terbaik dari yang ada. Demokrasi menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dan mendaya gunakannya melalui saluran-saluran yang tersedia.

Terkait dengan kedaulatan rakyat sebagai tema sentral dalam demokrasi, bahwa Pilkada langsung menawarkan nilai-nilai positif dalam hal-hal berikut. Pertama, rakyat dapat menggunakan hak-haknya secara langsung dan utuh. Salah satu hak politik rakyat adalah memilih calon pemimpin. Kedua, Pilkada langsung merupakan wujud nyata asas pertanggung jawaban dan akuntabilitas. Melalui Pilkada langsung seorang kepala daerah dituntut dapat mempertanggung jawabkan kepemimpinannya kepada rakyat pemilih. Tingkat penerimaan rakyat terhadap kepala daerah merupakan jaminan bagi peningkatan partisipasi politik rakyat yang pada gilirannya akan menjaga kelestarian sebuah kepemimpinan. Ketiga, Pilkada langsung dapat menciptakan suasana kondusif bagi terciptanya hubungan sinergis antara pemerintah dan rakyat.

Demikian pula dari segi substansi Pilkada langsung merupakan instrumen untuk mendapatkan kepemimpinan politik yang lebih akuntabel dan responsif, mendekatkan pemerintah daerah dengan warga, yang akan mendorong peningkatan pelayanan dan kesejahteraan bagi masyarakat di daerah yang bersangkutan. Akuntabilitas dibutuhkan kontrol publik. Kontrol menjadi lebih mudah dilakukan kalau ada transparansi kebijakan dan akses luas ke informasi oleh masyarakat. Teknologi dapat membantu meningkatkan transparansi dan penyebaran informasi kepada publik. Konsep akuntabilitas melibatkan dua hal secara sekaligus, yaitu penyediaan informasi dan sanksi. Perhitungan-perhitungan yang dilakukan perlu disajikan kepada publik dalam bentuk laporan ataupun publikasi. Kalau informasi-informasi yang disajikan sebagai hasil perhitungan-perhitungan yang dilakukan tidak memuaskan pihak yang berkepentingan (*stake holders*) pejabat yang bersangkutan kiranya akan terhukum oleh para *stake*



*holders* itu sendiri. Untuk menjamin kebenaran dan kewajaran pelaporan yang dibuat, dilakukanlah audit. Peta situasi-situasi sulit dan kemudahan-kemudahan yang dihadapi ketika Pilkada langsung diselenggarakan dan menghasilkan kepala-kepala daerah baru di berbagai daerah.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dinyatakan bahwa Pilkada langsung berdampak positif terhadap penegakan kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah, memunculkan pemimpin yang berkualitas, mampu meningkatkan pelayanan pemerintah daerah kepada rakyat, kepala daerah terpilih lebih responsif terhadap aspirasi masyarakat, akuntabilitas akan lebih baik, akan meningkatkan kinerja pemerintah daerah, kesejahteraan rakyat akan lebih diperhatikan, kontrol akan mudah dilakukan oleh rakyat, dan akan muncul pemimpin lokal yang lebih baik. Sedangkan sumber informasi tentang pilkada yang mereka dapatkan kebanyakan berasal dari media massa elektronik radio, televisi dan media interpersonal tatap muka yang kebanyakan dari teman kerja. Masyarakat mengharapkan bahwa pilkada tetap dipilih oleh rakyat secara langsung untuk menjaga nilai-nilai demokrasi di daerah.

Melalui aktivitas kampanye politik, informasi serta pengetahuan akan dapat dengan mudah disebarluaskan oleh partai politik dan calon Gubernur serta wakilnya. Tidak hanya informasi tentang partai politik dan calon Gubernur serta wakilnya, tetapi informasi tentang kondisi dan harapan-harapan masyarakat pun akan terbuka. Kampanye politik secara ideal bias membuat masyarakat semakin menyadari hak dan kewajiban mereka dalam berpolitik. Mereka tidak lagi memilih asal memilih, melainkan lebih mempertimbangkan banyak hal ketika

memutuskan akan memilih calon yang mereka unggulkan dalam Pemilihan Kepala Daerah, sebab kampanye politik menjadi sarana edukasi politik yang berguna untuk proses pembelajaran terbuka bagi setiap elemen masyarakat untuk menyadari hak dan kewajiban mereka sebagai warganegara dalam konteks pemilihan Kepala Daerah sebagai wujud dari pelaksanaan demokratisasi lokal.

Demokrasi sebagai aspek penting berkaitan dengan pemerintahan dengan hirarkhi kekuasaan yang terdapat dalam suatu sistem politik negara. Artinya, akan terdapat sistem politik nasional yang didalamnya terdapat sub sistem politik daerah dalam bingkai sistem negara yang dianutnya. Pemilihan demokrasi lokal ini bukan berarti terdapat determinasi wilayah pemberlakuan demokrasi atau bahkan terdapat perbedaan demokrasi dari induknya. Dalam tulisan ini demokrasi lokal ditujukan sebagai bagian utuh dari demokrasi di Indonesia dalam pelaksanaan rekrutmen elit politik di pemerintahan daerah.

Demokrasi lokal merupakan bagian dari subsistem politik suatu negara yang derajat pengaruhnya berada dalam koridor pemerintahan daerah. Di Indonesia Demokrasi lokal merupakan subsistem dari demokrasi yang memberikan peluang bagi pemerintahan daerah dalam mengembangkan kehidupan hubungan pemerintahan daerah dengan rakyat di lingkungannya. Semenjak era reformasi, demokrasi yang diusung mengarah pada demokrasi partisipatif atau langsung, salah satunya karena banyak pejabat politik yang tidak melakukan tanggung jawabnya dengan baik, sehingga legitimasi mereka lemah. Di sisi lain memunculkan ketidakpercayaan rakyat pada penguasa mendorong rekrutmen pejabat politik ke arah demokrasi langsung. Sehingga tidak mengherankan bila

rekrutmen hampir semua jabatan politik dilaksanakan dalam format demokrasi yang bergerak pada hubungan state and society secara langsung. Mulai dari pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD. Kemudian dilanjutkan dengan pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Pada fase demokrasi langsung ini merupakan era baru reformasi politik di Indonesia yang pertama kali digelar sejak kemerdekaan Indonesia. Rekrutmen politik skala nasional ini merupakan perkembangan demokrasi yang mendapat pengakuan dunia karena keberhasilannya.

Perubahan sistem politik dengan diberlakukannya sistem pemilihan langsung di daerah tidak sepenuhnya memberikan arti perubahan yang positif. Pilkada langsung pada prakteknya ternyata memunculkan serangkaian konflik dalam pelaksanaannya, dimana hal tersebut berbanding terbalik dengan tujuan awal diterapkannya sistem pemilihan langsung untuk menciptakan pemimpin daerah yang lebih berkualitas. Konflik-konflik yang muncul bahkan tak jarang berujung pada serangkaian tindakan anarkis yang jika tidak ditangani secara serius, justru akan mengarah pada persoalan disintegrasi bangsa. Apalagi pilkada langsung yang menempatkan ruang lingkup yang lebih luas dalam konteks pemilihannya.

Demokrasi lokal dalam pemilihan kepala daerah, menjadi momentum yang masih memberikan pertanyaan besar dalam pelaksanaannya. Pertanyaan ini berkaitan dengan demokrasi partisipatoris<sup>3</sup> yang akan dilakukan. Betapa tidak, pemberian kedaulatan rakyat daerah pada elitnya masih diwarnai ketidakjelasan, baik dari prosedur kerja penyelenggara maupun peserta dan posisi pemilihnya. Dari sisi kedaulatan rakyat daerah, demokrasi lokal dibangun untuk memberikan porsi

yang seharusnya diperoleh rakyat lokal dalam pemberian legitimasi pada elit eksekutifnya.

Melalui penguatan otonomi daerah diharapkan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah semakin meningkat sehingga memperkecil kesenjangan pusat dan daerah serta dapat mengembangkan keragaman potensi yang dimiliki setiap daerah. Era otonomi daerah sebagai bagian dari era Reformasi menempatkan kepala daerah semakin penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kepala daerah yang juga berkedudukan sebagai kepala pemerintahan daerah memiliki kekuasaan yang cukup besar untuk melakukan perubahan demi peningkatan kesejahteraan dan kemajuan daerah. Kepala daerah tidak hanya memiliki wewenang yang lebih besar untuk mengelola daerah sendiri, tetapi juga memiliki otonomi dari intervensi pemerintah pusat.

Kesadaran yang lebih dibutuhkan adalah kesadaran terhadap makna kedaulatan dan suara yang dimiliki sebagai warga negara serta konsekuensi dari pilihannya. Kesadaran ini juga meliputi nilai dan etika dalam berdemokrasi sehingga tidak akan dapat disuap, menjual suara, ataupun melakukan tindakan lain yang merusak demokrasi. Kedua adalah menentukan cara pemilihan secara berbeda-beda. Penentuan sistem pemilihan langsung atau melalui DPRD tentu dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti tingkat pendidikan, ekonomi, dan karakter masyarakat di daerah setempat. Faktor-faktor itu tentu berbeda-beda yang dengan sendirinya membawa konsekuensi bahwa tidak dapat diterapkan sistem pemilihan yang sama untuk semua daerah.